

## ABSTRAK

**Syafiq Affrillyansyah (2024): Penelitian ini berjudul “Implikasi Politik Pemutakhiran Data Pemilih Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah”**

Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan penting dalam pemilihan kepala daerah karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak politik warga negara dan legitimasi demokrasi. Permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih berpotensi menimbulkan implikasi politik, seperti menurunnya partisipasi pemilih, meningkatnya sengketa pemilihan, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilihan kepala daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemutakhiran data pemilih, implikasi politik yang ditimbulkannya, serta meninjaunya dari perspektif siyasah dusturiyah pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2024. Landasan teori yang digunakan meliputi kedudukan warga negara dalam pemilihan umum, teori demokrasi, dan konsep siyasah dusturiyah yang menekankan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Data penelitian terdiri atas data primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemutakhiran data pemilih serta hasil wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dan data sekunder berupa penelitian terdahulu serta literatur hukum dan siyasah Islam yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2024 telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, namun masih terdapat persoalan administratif yang berpotensi memengaruhi kualitas partisipasi politik dan legitimasi pemilihan. Ketidakakuratan data pemilih dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dan meningkatkan potensi konflik politik di tingkat daerah.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pemutakhiran data pemilih merupakan bagian dari amanah kekuasaan (*tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyyah*) yang wajib berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan terpenuhinya hak pilih seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai dasar terwujudnya pemilihan kepala daerah yang demokratis, berkeadilan, dan berlegitimasi kuat.

**Kata Kunci:** Implikasi Politik, Pilkada, *Siyasah Dusturiyah*